

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah isu yang dihadapi baik oleh negara yang sedang berkembang maupun negara maju, meskipun tingkat kemiskinan cenderung lebih rendah di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Seperti halnya negara sedang berkembang lainnya, Indonesia terus berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan di dalam wilayahnya yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara itu sendiri. Permasalahan yang ditimbulkan dari kemiskinan ini juga berakibat pada kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan ditandai dengan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dijelaskan sebagai keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar serta adanya ketidaksetaraan dalam pendapatan. Adanya hubungan erat antara kemiskinan dan standar hidup minimum dari kelompok tertentu, sementara ketidaksetaraan pendapatan menghasilkan variasi dalam standar hidup, bergantung pada sudut pandang individu. Keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka merupakan persoalan kemiskinan. Kesulitan ini begitu rumit sehingga memerlukan upaya lebih lanjut (Alifah & Imaningsih, 2023).

Tingkat kemiskinan dapat diminimalisir melalui proses pembangunan di suatu wilayah. Pembangunan adalah suatu perubahan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari kondisi sebelumnya,

melibatkan berbagai aspek untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dianggap sebagai salah satu pendekatan efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Pembangunan merupakan hasil dari kesinambungan usaha masyarakat di sektor ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, pendidikan, dan industri, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan melalui proses pembangunan berkelanjutan dengan tujuan mengatasi kemiskinan (Millenia Putri & Zaini Putri, 2021). Kemiskinan terjadi ketika masyarakat di beberapa daerah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai standar.

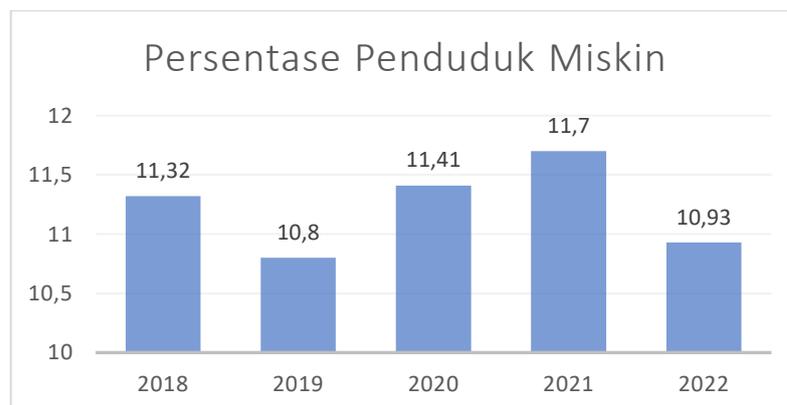
Kemiskinan diakibatkan oleh disparitas finansial antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, ketidaksetaraan dalam penyebaran pendapatan, jumlah individu yang berada di bawah batas kemiskinan, minimnya akses terhadap pendidikan, serta peningkatan angka pengangguran. Dengan jelas, faktor-faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain (E. H. Pratiwi & Malik, 2022). Kemiskinan juga membuat perkembangan dan kemajuan masyarakat menjadi terhambat akibat dari rendahnya pendapatan masyarakat.

Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan seperti, pertumbuhan ekonomi dan rasio ketergantungan di masing-masing daerah. Kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, yang sekaligus berfungsi sebagai indikator untuk menggambarkan sejauh mana aktivitas ekonomi wilayah tersebut dalam periode tertentu berhasil menghasilkan pendapatan bagi penduduknya dengan peningkatan

pendapatan per kapita (Iksan & Arka, 2022). Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu negara, masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan distribusi pendapatan dapat diatasi, sehingga negara tersebut dapat berkembang menjadi entitas yang adil dan sejahtera dalam aspek ekonominya.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di negara ini. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan penduduk sebanyak 37.032.410 jiwa. Tingginya jumlah penduduk di Jawa Tengah dapat menimbulkan kepadatan penduduk yang mempengaruhi aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Semakin tinggi jumlah penduduk semakin tinggi pula resiko terjadinya permasalahan di daerah tersebut. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebagian penduduknya masih belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

**Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022 (Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

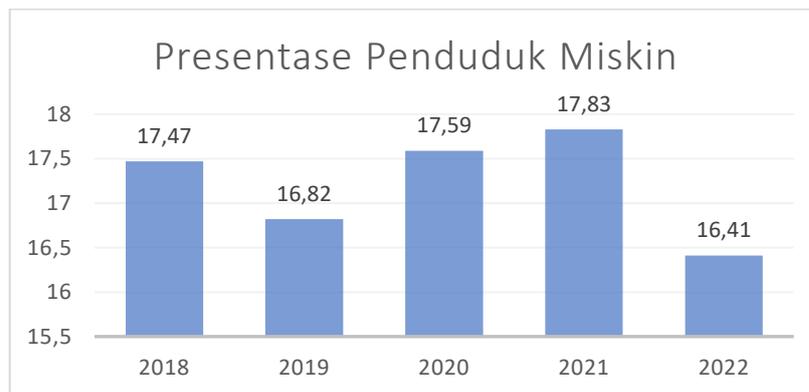
Berdasarkan gambar 1.1 diatas terlihat bahwa presentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2018 distribusi penduduk miskin sebesar 11,32% dan turun menjadi 0,8% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 presentase penduduk miskin kembali meningkat sebesar 11,41% dan terus meningkat sebesar 11.7% di tahun 2021 yang diakibatkan dari adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada melemahnya perekonomian. Tahun 2022 presentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 10,93% sebagai bentuk pemulihan dari pandemi di tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup membaik di tahun berikutnya.

Kabupaten Kebumen merupakan daerah ekstrim dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah dengan presentase kemiskinan sebesar 16,41%. Kabupaten Kebumen memiliki keunggulan dalam bidang industri pengolahan dan pertanian yang didukung dengan lahan yang mendukung dan luas serta sumber daya alam yang melimpah membuat sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat bergantung pada sektor pertanian, padahal saat musim panen tidak menutup kemungkinan banyak petani yang mengalami gagal panen.

Selain itu, Kabupaten Kebumen juga masih memiliki kendala terkait pengelolaan kondisi tanah yang tidak sehat akibat dari pemupukan kimia secara berlebihan, ditambah lagi dengan tersendatnya jaringan irigasi dan kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal tersebut membuat laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun sebesar -1,18 di tahun 2022 dan dapat berakibat

pada mata pencaharian sebagian masyarakat Kebumen dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan.

**Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen
Tahun 2018-2022 (Persen)**

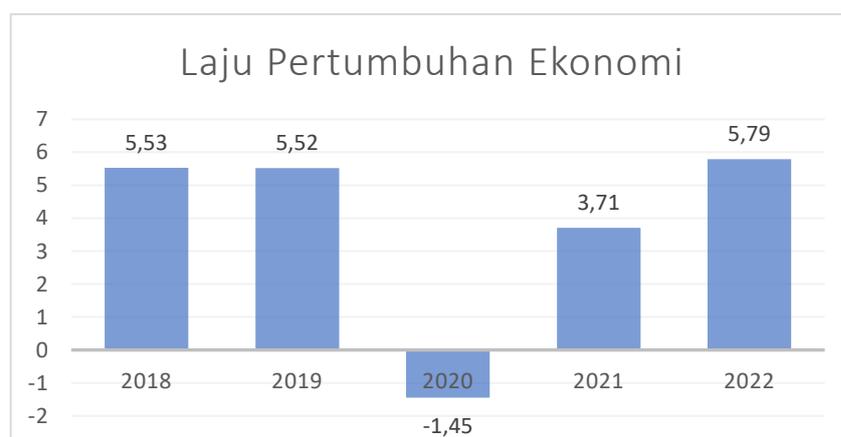


Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (diolah)

Dalam gambar 1.2 menunjukkan data tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022 yang cenderung mengalami fluktuasi. Tahun 2018-2019 mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari yang awalnya 17,47% menjadi 16,82% dan mengalami peningkatan secara bertahap di tahun 2020 dan 2021 sebesar 17,59% dan 17,83% yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang membuat sebagian masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Hal tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya, pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan menjadi 16,41% sebagai bukti dari pemulihan aktivitas perekonomian pasca pandemi. Meskipun tingkat kemiskinan tersebut mengalami penurunan, akan tetapi tidak membuat Kabupaten Kebumen keluar dari daerah dengan tingkat kemiskinan terparah. Kabupaten Kebumen masih menjadi daerah ekstrim dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi, peningkatan kekayaan, dan penurunan kemiskinan yakni melalui pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun, yang perlu diperhatikan bukan hanya hasil statistik, melainkan siapa yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Jika hanya sekelompok kecil yang menikmati hasilnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkembang. Sebaliknya, jika sebagian besar masyarakat turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan tersebut akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menciptakan pembangunan dan mendorong pengurangan kemiskinan (Iqbal Salsabil & Westi Rianti, 2023). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari capaian pertumbuhan ekonominya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdapat di negara tersebut (Amri, 2017).

**Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen
Tahun 2018-2022 (Persen)**



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (diolah)

Dari gambar 1.3 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen secara presentase di setiap tahunnya mengalami perubahan. Dimulai dari tahun 2018 dengan persentase sebesar 5,53% kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 sebesar 5,52%. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara drastis hingga mencapai angka -1,45%, hal itu terjadi dikarenakan turunnya aktivitas perekonomian di berbagai daerah sebagai akibat tingginya angka pandemi Covid-19 yang melanda berbagai negara membuat melemahnya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya tahun 2021 persentase pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 3,71% dan kembali meningkat sebesar 5,79% di tahun 2022.

Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang positif dan pengurangan ketidaksetaraan. Meskipun peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penting, hal itu tidak menjamin pengurangan kemiskinan secara optimal. Keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan memerlukan langkah-langkah tambahan, seperti mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan faktor-faktor lain yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Iqbal Salsabil & Westi Rianti, 2023). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diiringi dengan upaya konkret untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memperbaiki faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan.

Rasio Ketergantungan menjadi salah satu parameter krusial yang mencerminkan situasi ekonomi suatu negara, termasuk negara maju dan berkembang. Indeks ketergantungan juga menggambarkan kemajuan ekonomi di suatu daerah. Saat rasio ketergantungan tinggi, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat atau pendapatan masyarakat rendah. Di sisi lain, rasio ketergantungan

yang rendah dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena sebagian pendapatan usia produktif dapat digunakan untuk investasi dan tabungan.

**Gambar 1.4 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kebumen
Tahun 2018-2022 (Persen)**



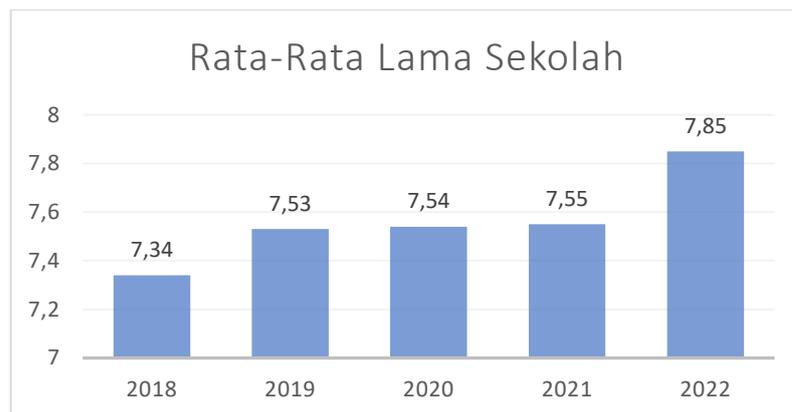
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (diolah)

Dari gambar 1.4 terlihat bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif di lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 rasio ketergantungan berada di angka tertinggi yaitu mencapai 55,98%. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 45,32%. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 rasio ketergantungan mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 45,64% dan 46,01%. Kondisi seperti ini disebabkan oleh sebagian pendapatan kelompok produktif harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok non produktif sebagai bentuk tanggungan dari kelompok usia produktif.

Selain itu, satu hal yang dapat menjadi penanda kesejahteraan sosial yang merata adalah memperhatikan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dapat diukur dengan melihat rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk di suatu wilayah. Hal tersebut memperlihatkan sejauh mana jenjang pendidikan penduduk

dewasa di suatu daerah telah berkembang secara umum (Adriana, 2020). Secara tidak langsung, tingkat pendidikan yang tinggi dapat membantu peningkatan produktivitas dan pola kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan secara langsung, tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga dapat menciptakan pola produktivitas dan kreativitas yang memadai guna memperoleh kesejahteraan hidup yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan maupun konsumsinya (Nabawi, 2020).

**Gambar 1.5 Tingkat Pendidikan Kabupaten Kebumen
Tahun 2018-2022 (Tahun)**



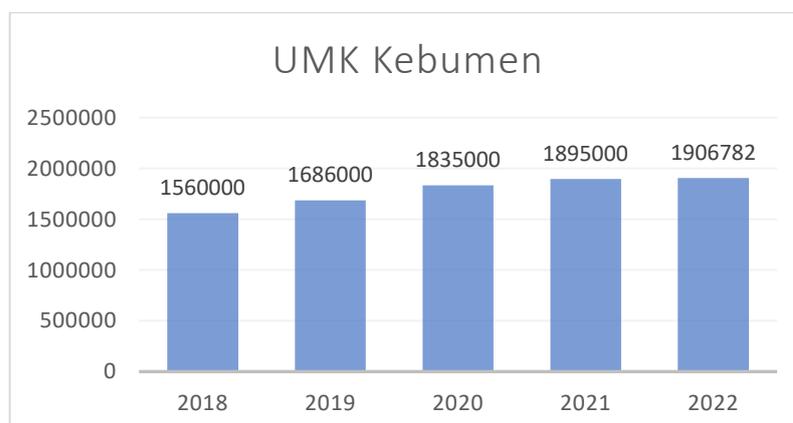
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (diolah)

Pada gambar 1.5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kebumen tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan secara bertahap di setiap tahunnya walaupun belum signifikan dah masih dikisaran 7 tahun. Tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah berada di 7,34 tahun, selanjutnya tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami peningkatan sebesar 1 satuan. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 menyentuh angka 7,85 tahun. Angka tersebut menunjukkan rata-rata pendidikan penduduk berumur 25 tahun ke

atas masih mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP atau setara dengan kelas VII. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat di Kabupaten Kebumen untuk memperoleh pendidikan mengalami peningkatan.

Faktor lain penyebab kemiskinan di negara berkembang juga dapat dipengaruhi oleh distribusi pendapatan masyarakat di wilayahnya. Ketika para pekerja mendapatkan upah yang rendah dapat membuat pola konsumsi kehidupan sehari-hari menurun, hal itu berakibat pada kesejahteraan masyarakat dan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Upah adalah imbalan berupa uang yang diterima oleh pekerja atau buruh sebagai hasil dari kerja keras mereka yang diberikan oleh majikan atau pemberi kerja. Besaran dan pembayaran gaji ini disesuaikan dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau hukum yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya sebagai penghargaan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. (Farhan et al., 2023).

**Gambar 1.6 Upah Minimum Kabupaten Kebumen
Tahun 2018-2022 (Rupiah)**



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (diolah)

Dari gambar 1.6 terlihat bahwa upah minimum Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan di lima tahun terakhir. Tahun 2018 upah minimum Kabupaten Kebumen sebesar Rp 1.560.000 hingga pada tahun 2022 mencapai Rp 1.906.782. Upah minimum di Kebumen tergolong masih rendah dan belum menyentuh angka 2 juta jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan dengan merujuk pada penetapan kebijakan upah minimum di tiap-tiap wilayah, yang diputuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) serta jaringan keselamatan sosial (dengan memperhitungkan keperluan layanan pendidikan dan transportasi yang mendasar).

Pendapatan dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Bagi penduduk yang bekerja, peningkatan produktivitas pekerja dapat dicapai melalui peningkatan upah. Upah Minimum Provinsi (UM) merujuk pada tingkat upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak (Chairunnisa & Qintharah, 2022).

Dari latar belakang dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Ketergantungan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kebumen”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen?
2. Apakah rasio ketergantungan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen?
4. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio ketergantungan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
4. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tetap terarah pada permasalahan, maka diperlukan adanya batasan ruang lingkup penelitian antara lain:

1. Penelitian ini mencakup series data selama 2005 – 2022 pada Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan, tingkat pendidikan, dan upah minimum sebagai variabel independen.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti mengenai indikator apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan atau masukan kepada pemerintah setempat yakni Kabupaten Kebumen dalam merencanakan dan menerapkan kebijakan yang efektif sesuai dengan visi misi Kabupaten Kebumen dalam mengurangi angka kemiskinan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi kepada semua pihak yang akan melakukan penelitian dengan indikator dan kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen.